

Merebaknya Intoleransi (*Hate Speech dan Hate Crime*) dalam Politik Indonesia

Munandzirul Amin

Pegawai di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

Abstract

Democracy provides a place for us to learn to live with the enemy because only democracy allows tension and paradox, which comes from freedom, to occur in society. In contrast to the New Order era, we can now enjoy freedom of opinion and association. This freedom can in turn produce tension. The relationship between elements of society with one another, or the relationship between the state and elements of society, can be tense because of differences in interests in regulating social and political order. Meanwhile, Indonesian society witnessed the paradox which also originated from freedom. This, for example, is shown by the emergence of intolerant groups such as the Islamic Defenders Front (FPI) and Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI). Even organizations such as HTI are of the view that democracy is not in accordance with the teachings of Islam in terms of sovereignty in the hands of the people, what should determine that is the preogative right of Allah SWT. The government in the view of HTI only implements sharia and determines administrative technical issues.

Keywords: *Hate Speech, Hate Crime, Intolerant*

Pendahuluan

Demokrasi memberikan tempat bagi kita belajar hidup bersama musuh karena hanya demokrasi yang memungkinkan ketegangan dan paradoks, yang bersumber dari kebebasan, terjadi di masyarakat. Berbeda dengan masa Orde Baru, kita kini bisa menikmati kebebasan berpendapat dan berasosiasi. Kebebasan tersebut pada gilirannya bisa menghasilkan ketegangan. Hubungan antara elemen masyarakat yang satu dengan yang lainnya, atau hubungan antara negara dengan elemen masyarakat, bisa tegang karena perbedaan kepentingan dalam mengatur tatanan sosial dan politik.

Sementara itu, masyarakat Indonesia menyaksikan paradoks yang juga bersumber dari kebebasan. Ini, misalnya, ditunjukkan dengan kemunculan kelompok intoleran seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan organisasi seperti HTI berpandangan bahwa demokrasi tidak sesuai ajaran Islam dalam hal kedaulatan di tangan rakyat, semestinya yang menentukan itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Pemerintah dalam pandangan HTI hanya

melaksanakan syariah dan menentukan masalah teknis administratif.¹

Tetapi dalam pandangan saya, walaupun pemikiran HTI itu memang mengerikan, tapi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul jauh lebih penting. Cerita di atas berbeda jauh dengan keadaan di Indonesia sekarang. Bukan saja soal membela hak berekspresi atau hak berkumpul, tapi juga penggunaan kekerasan. Banyak kelompok seperti GAPAS, FUUI atau FPI secara rutin menggunakan kekerasan dan intimidasi sebagai taktik advokasi. Kegiatan mereka menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat madani di Indonesia saat ini tidak membantu mengkonsolidasikan demokrasi, seperti diharapkan dari kelompok-kelompok seperti itu, tetapi justru secara aktif melemahkan nilai-nilai demokratis.

Kekerasan adalah musuh utama demokrasi, bertentangan dengan spirit dan substansinya. Demokrasi sebagai jalan hidup (*way of life*) dengan seperangkat institusinya adalah sarana non-[kekerasan](#). Di bawah kondisi demokratis, kepentingan dan kekuasaan tidak bisa diperoleh lewat jalan

¹ Lihat "HTI Tolak Demokrasi" dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/443199-hti-tegaskan-tolak-demokrasi-tetapi-berharap-mk-kabulkan-gugatannya.html> diakses pada, Minggu, 23 Juli 2017 | 21:58 WIB

pemaksaan, tetapi melalui konsensus yang memerlukan penghormatan publik atas *rule of law*. Ungkapan dan perilaku intoleran adalah sesuatu yang disayangkan tapi juga lazim di negara demokrasi. Di setiap tempat di mana orang bebas bersilang pendapat mengenai isu-isu pokok, akan ada yang berpikiran dan berlaku intoleran, sebagian mengatur gerakan sosial untuk mempromosikan gagasan intolerannya, yang lainnya berusaha mendesak negara agar menegakkan gagasan intoleran. Ini memang mengkhawatirkan, tetapi tidak mengejutkan. Di Amerika Serikat, misalnya, yang demokrasinya terkonsolidasi, ada lebih dari 6.000 kejahatan kebencian dalam setahun.² Kejahatan ini dipicu prasangka etnis, agama, atau seksual. Jadi melawan intoleransi agama di Indonesia itu penting, tapi penting juga untuk memperjelas bahwa Indonesia layak bangga akan transisi dan konsolidasi demokrasinya. Demokrasi Indonesia adalah contoh baik bagi dunia berkembang, bagi dunia Muslim, dan bagi Asia Tenggara. Kejadian-kejadian intoleransi agama yang sangat disayangkan itu tidak mengecilkkan fakta dasar tersebut.

² Lihat Federal Bureau of Investigations, "Uniform Crime Reports," <http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/> (accessed 09/24/2017).

Berbagai bentuk kekerasan itu berkelindan dengan kecenderungan meraih kekuasaan dengan mengoperasikan sarana pemaksaan dan kebencian (*hate crime*). Pertanyaan ini penting diajukan karena menyangkut beberapa pertanyaan berikutnya, terutama terkait dengan penegakkan Konstitusi Indonesia dalam konteks keragaman agama-agama dan keyakinan: 1) Bagaimana bisa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis berdasarkan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945), sementara pemerintah membiarkan kelompok intoleran melakukan "penghakiman jalanan" terhadap kelompok-kelompok lain yang mereka anggap keberagamaannya "tidak sama seperti mereka"? 2) Bagaimana bisa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis berdasarkan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945), apabila beberapa pejabat pemerintahan menjalankannya berdasarkan kepentingan eksklusif agama tertentu ?

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Tujuan utama dari studi ini adalah menyediakan penjelasan yang

memadai dan kuat terkait perjalanan demokratisasi di Indonesia. Secara khusus ingin mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai bagaimana sistem pemerintahan yang demokratis menyisakan ruang-ruang yang lebar bagi berkembangnya kelompok-kelompok intoleran/antidemokrasi.

2. Studi ini berupaya melihat Bagaimana bisa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis jika ada beberapa pejabat pemerintahan mengeluarkan kebijakan berdasarkan kepentingan eksklusif agama tertentu.

Penelitian ini mengklasifikasi tiga jenis kelompok garis-keras yang berkembang di Indonesia yang demokratis: *pertama*, kelompok main hakim sendiri, dan FPI adalah yang paling terkenal dalam kategori ini; *kedua*, kelompok advokasi di tingkat akar-rumput, bisa diwakili oleh GARIS di Cianjur yang juga kerap menggunakan taktik kekerasan; dan *ketiga*, kelompok transformatif yang diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang ingin

menggantikan sistem demokratik di Indonesia dengan khilafah.

Vigilantisme (Main Hakim Sendiri)

Aksi main hakim sendiri, dengan sendirinya, bertentangan dengan demokrasi. Lepas dari kelompok garis-keras, Indonesia memiliki angka kekerasan vigilante yang sangat tinggi. Untuk memberikan gambaran, kita dapat melihat data dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) yang sekarang dikelola Menkokesra. Kekerasan di Indonesia dibagi menjadi sepuluh kategori: sumber daya, administrasi, elektoral, separatis, dan sebagainya, tetapi kategori terakhir adalah “main hakim sendiri”. Jumlah insiden di sini begitu tinggi, sehingga

dirasa perlu untuk membuat kategori khusus untuk itu. Aksi main hakim sendiri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Orde Baru memobilisasi preman dan geng pemuda untuk menyerang komunis seperti yang diperlihatkan dalam film dokumenter *The Act of Killing* (2012) dan kemudian mensponsori mereka masuk ke organisasi seperti Pemuda Pancasila.³ Pada hari-hari awal reformasi kita melihat pembentukan pam swakarsa

³ David Brown dan Ian Wilson, “Ethnicized Violence in Indonesia: Where Criminals and Fanatics Meet,” *Nationalism and Ethnic Politics*, Vol. 13, No. 3, 23 Agustus 2007, hal. 373.

yang dibuat aparat keamanan dengan melibatkan kelompok-kelompok milisi dari kalangan preman dan kelompok Islam sebagai kekuatan penyeimbang terhadap gerakan mahasiswa. Di antara mereka adalah FPI.

FPI bisa saja menggunakan aksi main hakim sendiri yang merusak prinsip-prinsip demokrasi, tapi kelompok ini berbeda dari kelompok garis-keras lainnya karena secara ideologis FPI tak memiliki masalah dengan demokrasi. Mereka tidak memperjuangkan negara Islam. Bisa saja anggotanya mengejar sebuah jabatan di pemerintah atau sepanggung dengan para kandidat dalam pemilu lokal. Bahkan FPI sempat berpikir untuk mendaftar sebagai partai politik. Misalnya kita melihat, pada 21 Februari 2013, ketika kampanye pilgub Jawa Barat akan berakhir, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menandatangani perjanjian dengan FPI untuk sepenuhnya menerapkan peraturan anti Ahmadiyah. Michael Buehler, yang telah melakukan penelitian yang luas tentang masalah ini, mencatat dalam sebuah artikel baru-baru ini, bahwa menjanjikan perda syariah atau program islami lainnya dapat memungkinkan politisi lokal untuk

meningkatkan citra publik *vis à vis* lawan-lawan mereka.⁴

Vandalisme (Advokasi di Tingkat Akar-Rumput)

Kelompok vandalisme ini adalah kelompok masyarakat yang tindakannya kerap bertentangan dengan demokrasi. sebagai contoh adalah GARIS (Gerakan Reformis Islam), merupakan sebuah organisasi akar-rumput yang cukup kaya di Cianjur dan dipimpin oleh Haji Chep Hernawan. Seperti FPI, GARIS didirikan beberapa saat setelah reformasi 1998. Organisasi ini didirikan bukan sebagai pam swakarsa, tapi sebagai organisasi yang menjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial yang dikhawatirkan akan membawa pergolakan politik termasuk kemungkinan kembalinya komunisme di Indonesia. Meskipun Haji Chep Hernawan sempat jadi bendahara Partai Bulan Bintang selama bertahun-tahun, Chep melihat bahwa demokrasi secara fundamental bertentangan dengan Islam, karena mayoritas dapat memutuskan sebuah kebijakan (legalisasi prostitusi, misalnya), yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam sebuah wawancara pada 2011, dia mengatakan bahwa tiga ancaman terbesar bagi Jawa Barat adalah

⁴ Michael Buehler, "Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing Shari'a Policies in Two Provinces," *Comparative Politics*, Vol. 46, No. 1 (Oktober 2013).

Jaringan Islam Liberal, HKBP, dan ateis-komunis. Pelajaran yang ditarik oleh Chep Hernawan dari insiden tersebut menarik: Jika Anda akan membakar gedung-gedung, lebih baik Anda melakukannya malam hari, sehingga Anda tidak tertangkap.⁵ Dia melihat vandalisme sebagai sesuatu yang dibenarkan, dan penangkapan sebagai bagian dari perjuangan dan dia hampir kebal dari hukum, sebagai seorang pengusaha terkemuka, tokoh masyarakat, politisi, dan ulama.

Jaringan kelompok ini juga dapat diartikan sebagai “aktor yang memperjuangkan suatu hal, yang terikat oleh nilai yang sama, diskursus yang sama, serta penukaran informasi dan pelayanan secara intensif.”⁶ Di Jawa, Sulawesi dan Sumatra, kita sedang melihat kelompok intoleran bergabung dengan beberapa “front” atau “forum” untuk meyakinkan atau menekan pemerintah agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jumlahnya cukup penting: seorang bupati atau kapolres pasti lebih cenderung menyegel sebuah gereja kalau kelompok yang menuntut

itu mewakili 15 ormas daripada hanya satu. “Penukaran informasi secara intensif” difasilitasi via Whats’up dan media sosial, yang memungkinkan mobilisasi yang cukup besar tanpa perencanaan yang panjang. Aksi protes dan demo bisa membuktikan secara visual kepada para peserta bahwa mereka adalah bagian dari gerakan sosial, yang tujuannya benar. Koalisi Islamis dengan cara begini adalah alat penting untuk memperkuat solidaritas kelompok.⁷

Klandestin (Transformatif)

Jika FPI dan kelompok sejenisnya sering melanggar hukum, walaupun mereka tidak punya masalah dengan demokrasi, maka kelompok ini pada dasarnya anti-demokrasi. HTI adalah organisasi yang sangat hati-hati dengan batas-batas hukum. Mereka tidak menggunakan kekerasan, meskipun kadang-kadang mendukung orang lain yang melakukannya. Tujuannya bersifat revolusioner dan anti-demokrasi, dan salah satu cabang terbesar di dunia ada di Indonesia. Mereka telah menetapkan tiga tahapan untuk meraih kekuasaan. Yang pertama adalah pembinaan (*tatsqif*), di mana mereka mengidentifikasi calon anggota. Yang

⁵ Sidney Jones, “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran” Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Jakarta, 2015. hal. 15

⁶ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink memaparkan jaringan advokasi transnasional dalam karya mereka, “Transnational advocacy networks in international and regional politics,” UNESCO, 1999.

⁷ Lihat Jesus Casquete, “The Power of Demonstrations,” *Journal of Social, Cultural and Political Protest*, Vol. 5, No. 1 (Mei 2006), hal. 45-60.

kedua adalah berinteraksi dengan masyarakat (*tafa'ul*), di mana mereka memperkenalkan anggota komunitas Muslim dengan tujuan organisasi, dengan harapan mereka memberikan dukungan mereka. Yang ketiga adalah mengambil alih kekuasaan (*istilamu al-hukmi*), di mana hal itu bertujuan untuk membangun jaringan pemerintah di bawah kekhalifahan baru.⁸

Sikap Intoleransi di Indonesia

Satu pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah dalam pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis berdasarkan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945) membiarkan kelompok intoleran melakukan “penghakiman jalanan” terhadap kelompok-kelompok lain yang mereka anggap keberagamaannya “tidak sama seperti mereka”. Jawabannya sangat penting, karena jika Indonesia sebagian masyarakatnya semakin intoleran, maka tugas melestarikan pluralisme dan melindungi kaum minoritas akan lebih sulit.

Dalam studi Pew Research Center tentang Islam global, Indonesia muncul sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang paling terbuka.

⁸ Mohamed Nawab Mohamed Osman, “The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia,” *Southeast Asia Research*, Vol. 18, No. 4 (Desember 2010), hal. 737.

Meski begitu, masih 72 persen Muslim Indonesia yang disurvei mendukung formalisasi hukum Islam. Hasil ini membuat dukungan untuk syariah di Indonesia sedikit lebih lemah dari Mesir (sebelum *Arab Spring*) dan sedikit lebih kuat dari Tunisia.⁹ Sekitar 21 persen melihat Kristen sebagai memusuhi (*hostile*) Islam dan 16 persen melihat Muslim sebagai memusuhi orang-orang Kristen. Angka ini sedikit lebih rendah dari ketegangan antar-agama di Malaysia, dan jauh lebih baik daripada Mesir di mana di atas 50 persen dari mereka melihat Kristen sebagai musuh. Indonesia menempati salah satu tingkat terendah dari semua negara dalam penerimaan terhadap pernikahan antar-agama (pertanyaannya adalah apakah responden akan merasa nyaman jika putra atau putri mereka menikah dengan seorang Kristen).¹⁰ Pada saat yang sama, 53 persen orang Indonesia khawatir terhadap ekstremisme dalam komunitas Muslim, dibandingkan, misalnya, dengan hanya 8 persen orang Malaysia atau 22 persen orang Palestina. Ini berarti bahwa kaum Muslim

⁹ Pew Research Center, *The World's Muslims: Politics, Faith, Society*, Washington DC, 30 April 2017.

¹⁰ Pew Research Center (2017). Hanya 6 persen Muslim Indonesia mengatakan bahwa mereka akan merasa nyaman jika putra mereka menikahi seorang Kristen, dibandingkan dengan 14 persen warga Bangladesh dan Palestina, 16 persen orang Malaysia, dan 30 persen warga Tunisia.

Indonesia pada umumnya melihat toleransi sebagai sesuatu yang baik.

Survei-survei yang dilakukan di Indonesia rupanya menunjukkan pengerasan sikap. Survei oleh Lembaga Survei Indonesia dan PPIM tahun 2014-2016 memberikan petunjuk pertama bahwa Indonesia tidak setoleran sebagai citra diri sendiri. Pada tahun 2016, sebuah survei LAKIP menjadi berita hangat dengan menunjukkan bahwa 49 persen dari siswa SMP/SMA yang disurvei mendukung kegiatan radikal atas nama agama. Survei tersebut ditujukan kepada guru Pendidikan Agama Islam dan siswa mereka dan dilakukan di wilayah metropolitan Jakarta dan sekitarnya antara Oktober 2015 dan Januari 2016. Sekitar 42 persen guru dan 52 persen siswa mendukung penyegelan dan perusakan terhadap rumah-rumah ibadah yang tidak sah. Sekitar 38 persen dari guru-guru dan lebih dari 68 persen dari siswa mendukung perusakan rumah atau fasilitas anggota aliran sesat. Sebuah persentase yang lebih rendah mengatakan bahwa mereka siap untuk mengambil bagian dalam aksi-aksi kekerasan itu sendiri.¹¹ Secara umum,

survei menemukan bahwa guru-guru agama pada umumnya kurang toleran dibandingkan siswa mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana guru agama dilatih dan oleh siapa, dan bagaimana toleransi dapat diajarkan jika ada pengaruh kuat sebaliknya.

Akhirnya, kita dapat mengutip survei CSIS yang dilakukan di 23 provinsi pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa proporsi yang signifikan dari Indonesia, meskipun masih minoritas, tidak nyaman terlalu dekat dengan pemeluk agama lain. Seperti dilaporkan secara luas oleh Phillips Vermonte, direktur risetnya, sekitar 60 persen mengatakan mereka tidak keberatan tinggal di sebelah orang dari agama lain, sementara lebih dari 33 persen menyatakan ketidaknyamanan. Lebih dari 68 persen tidak ingin rumah ibadah selain agamanya dibangun di komunitas mereka. Penolakan hampir sama tinggi di antara mereka yang berpendidikan tinggi dan mereka yang berhenti sampai SMP.¹² Dari satu segi, keputusan bersama menteri mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dirancang untuk mengatasi masalah ini, tapi di beberapa

¹¹ "Ini dia Hasil Survei LAKIP Yang menghebohkan itu," detik.com, 28 April 2017. Mereka yang disurvei adalah 590 guru dan 997 siswa SMP dan SMA di sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

¹² "Survei: Toleransi Beragama Orang Indonesia Rendah" www.tempo.co , 5 Juni 2017.

praktik oligarki politik terus merajalela;

- b. Ketimpangan di bidang ekonomi (*economic inequality*) tercermin index gini ratio yang meningkat dari 0,35 menjadi 0,41. Artinya, meskipun perekonomian tumbuh dan dinilai cukup baik, tetapi kesenjangan ekonomi semakin timpang.¹³

Kebebasan yang menimbulkan efek samping yang tidak dikehendaki tersebut, diperparah pula oleh adanya tradisi budaya feodal dalam masyarakat, sehingga ketidakadilan struktural menjadi semakin timpang dan langgeng. Hal itu disebabkan, karena:

- a. Feodalisme justru memicu, memperkuat, dan memberi pembenaran kultural atas pemusatan kekuasaan di tangan elite seperti tercermin dalam kecenderungan makin membirunya darah politik di semua kalangan politisi dan kian meluasnya praktik politik dinasti pasca reformasi; dan
- b. Feodalisme juga memberi pembenaran atas sikap negara dan penyelenggara negara yang tidak hadir atau terlihat seperti tidak efektif

bekerja. Para penyelenggara negara terbuai oleh budaya kerja feodal, sehingga terlihat seperti hanya menikmati layanan, bukan melayani (*servicing*); sekedar mengambil (*taking*), bukan memberi (*giving*).

Selain hal itu, kecenderungan tidak adanya pemisahan atau pembatasan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interests*) antara penguasa dan pemegang kendali di ranah negara (*state*), masyarakat (*civil society*), pasar (*market*), dan media, juga menimbulkan masalah yang tersendiri dalam pengelolaan sistem demokrasi modern masa kini. Oligarki politik, feodalisme budaya, dan konglomerasi ekonomi, serta penguasaan media terutama elektronik yang cenderung memusat ke di satu tangan atau satu kelompok kepentingan, menambah daftar masalah serius yang di masa depan dapat menyebabkan sistem demokrasi hanya bekerja secara formal dan prosedural (*formal and procedural democracy*). Harapan akan praktik demokrasi substansial (*substantive democracy*) yang ditopang oleh struktur keadilan yang juga substansial (*substantive justice*), tidak sekedar formal dan prosedural (*formal and procedural justice*), memerlukan langkah-langkah nyata dengan ditopang oleh kesadaran

¹³ Jimly Asshiddiqie, "Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi" disampaikan dalam Dialog Kebangsaan tentang "Toleransi Beragama", Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari, 2014.

olah pemerintah saat ini berasumsi bahwa semakin sering Pancasila dibaca, semakin kuat nilai-nilai akan ditanam di otak dan tindakan.

Ada beberapa masalah dengan asumsi ini. *Pertama*, Pancasila “berhasil” di masa Orde Baru karena di baliknya ada mesin yang represif. Tidak seorang pun ingin mesin itu kembali bekerja. Kita tidak ingin orang ditangkap karena merongrong Pancasila, apalagi melihat kebijakan seperti azas tunggal kembali. Belum pasti juga bahwa menambah jam pendidikan Pancasila akan menghalangi Hizbut Tahrir dari menyebarkan teori konspirasi atau Chep Hernawan untuk menggerakkan anak buahnya untuk menyerang gereja. *Kedua*, Indonesia di bawah Orde Baru bukanlah surga pluralis seperti kadang-kadang digambarkan. Kita hanya harus melihat kembali perlakuan terhadap etnis Tionghoa untuk memahami bahwa toleransi saat itu adalah sesuatu yang berlangsung selektif. Dan Indonesia pada akhir tahun 2013 adalah tempat yang sangat berbeda dengan Indonesia zaman Orde Baru. Kita harus cari metode baru untuk mengajar toleransi dalam negara yang dinamis dan bebas, tanpa mengurangi hak-hak politik dan sipil yang begitu penting.

Jika kita mencari kemungkinan solusi atas masalah di atas, di samping *zero tolerance* terhadap kekerasan, harus diperhatikan betul unsur kepemimpinan. Ini harus mencakup komitmen untuk bekerjasama dengan polisi, jaksa dan hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal untuk kejahatan kebencian, dengan menggunakan KUHP yang ada. Hal ini juga harus mencakup program untuk meninjau dan mengevaluasi program pelatihan untuk guru-guru agama semua guru agama – untuk memastikan bahwa ajaran agama tidak menjadi kendaraan untuk mengajarkan intoleransi. Dan akhirnya, itu juga harus mencakup komitmen untuk memastikan bahwa semua orang yang diangkat sebagai anggota Kabinet punya komitmen yang terbukti untuk toleransi, khususnya di Kementerian Agama.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *“Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi”* disampaikan dalam Dialog Kebangsaan tentang “Toleransi Beragama”, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari, 2014.
- Bleich, Erik. 2011. “The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in

- Liberal Democracies," *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 37, No. 6, hal. 917-934.
- Brown, David dan Ian Wilson. 2007. "Ethnicized Violence in Indonesia: Where Criminals and Fanatics Meet," *Nationalism and Ethnic Politics*, Vol. 13, No. 3, hal. 373.
- Buehler, Michael. 2013. "Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing Shari'a Policies in Two Provinces," *Comparative Politics*, Vol. 46, No. 1.
- Casquete, Jesus. 2006. "The Power of Demonstrations." *Journal of Social, Cultural and Political Protest*, Vol. 5, No. 1, hal. 45-60.
- International Crisis Group. 2012. "Indonesia: From Vigilantism to Terrorism in Cirebon," *Asia Briefing* No. 132, 12 January 2012.
- Jones, Sidney. 2015. *"Sisi Gelap Reformasi di Indonesia Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran"*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
- Keck, Margaret E. dan Kathryn Sikkink. 1999. "Transnational advocacy networks in international and regional politics," UNESCO.
- LSI. 2006. "Support for Radical Religious Attitudes and Behaviour". www.LSI.or.id/file_download/18.
- Osmen, Mohamed Nawab Mohamed. 2010. "The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia," *Southeast Asia Research*, Vol. 18, No. 4, hal. 737.
- Pew Foundation. 2013. *The World's Muslims: Politics, Faith, Society*. New York.